



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS I	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	UNTUK DI TTD

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

--	--	--	--	--



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

✓	Ⓟ	Ⓟ		
---	---	---	--	--

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

v	R	J		
---	---	---	--	--

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1). Semula : Rp. 27.250.000.000,-

2). Bertambah/(berkurang) : Rp. 20.640.791.457,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan :
Rp. 47.890.791.457,-

b. Dana Perimbangan sejumlah

1). Semula : Rp. 580.916.110.000,-

2). Bertambah/(berkurang) : Rp. 938.402.000,-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan :
Rp. 581.854.512.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1). Semula : Rp. 117.860.733.000,-

v	PR	/	
---	----	---	--

2). Bertambah/(berkurang) : Rp 1.166.961.000,-
 Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah Yang sah setelah
 Perubahan :Rp. 119.027.694.000,-

Jumlah Pendapatan

a. Semula : Rp. 726.026.843.000,-

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 22.746.154.457,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan :Rp. 748.772.997.457,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja pegawai sejumlah

1. Semula Rp. 226.191.590.551,-

2. Bertambah/(berkurang Rp. (11.404.988.901,-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 214.786.601.650,-

2). Belanja bunga sejumlah

1. Semula Rp. -

2. Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. -

3). Belanja subsidi sejumlah

1. Semula Rp. 3.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 50.000.000,-)

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 2.950.000.000,-

4). Belanja hibah sejumlah

1. Semula Rp. 12.303.700.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.773.900.000,-

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 15.077.600.000,-

5). Belanja bantuan sosial sejumlah

1. Semula Rp. 1.650.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 196.500.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp. 1.846.500.000,-

6). Belanja bagi hasil sejumlah

1. Semula Rp. 650.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 25.000.000,-)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

Rp. 625.000.000,-

7). Belanja bantuan keuangan sejumlah

1. Semula Rp. 137.977.055.650,-

1				
---	---	---	--	--

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
Rp. 137.977.055.650,-

8). Belanja tidak terduga sejumlah

1. Semula Rp. 1.250.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 750.000.000),-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp. 500.000.000,-

b. Belanja Langsung

1). Belanja pegawai sejumlah

1. Semula Rp. 43.515.965.475,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.659.273.698,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 45.175.239.173,-

2). Belanja barang dan jasa sejumlah

1. Semula Rp. 135.370.041.720,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.393.530.933,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan
Rp. 162.763.572.653,-

3). Belanja modal sejumlah

1. Semula Rp. 187.889.087.048,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 362.453.602,-)

Jumlah belanja modal setelah Perubahan
Rp. 187.526.633.446,-

Jumlah Belanja

a. Semula : Rp. 749.797.440.444,-

b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 19.430.762.128,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan : Rp. 769.228.202.572,-

Surplus/(Defisit setelah perubahan) :Rp. (20.455.205.115,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 26.770.597.444,-

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.315.392.329,-)



Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 25.455.205.115,-

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 3.000.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,-

				
---	---	---	--	--

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :
0,00,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2 Oktober 2017

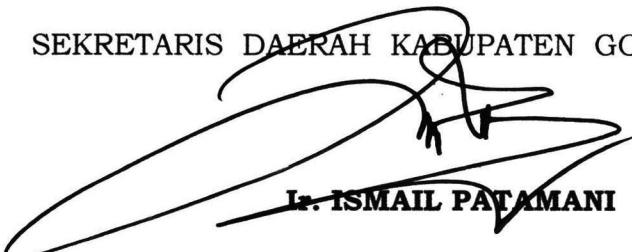
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 332

✓	Ⓚ	✓			
---	---	---	--	--	--